

BAB IV

ORGANISASI DAN PROFESIONALISME HUMAS

A. Organisasi Humas di Indonesia

1. BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat)

Sejak 1971- 1999 semenjak berdirinya, Bakohumas berada dibawah naungan departemen penerangan RI, dapat diketahui bahwa pada era itu kondisi Indonesia sedang berada dibawah rezim Soeharto, sehingga segala bentuk kerja tidak bisa dilakukan secara maksimal. Semasa itu kementrian penerangan berfokus untuk masa pembangunan Indonesia, sehingga seluruh staf yang berkiprah disini, dibekali dengan pedoman-pedoman mengenai penerangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bakohumas pun juga dituntut untuk menjadi sarana penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. (Hakim Wilda dkk 2013: 12)

Dalam pertemuan Bakohumas pusat tanggal 5 Desember 1994, Menteri penerangan Harmoko mengatakan bahwa apresiasi serta kinerja humas pemerintah di pusat maupun daerah saat itu telah meningkat secara kualitatif. (Hakim Wilda dkk 2013: 14) Bakohumas memiliki beberapa peran penting yakni membantu terselenggarakannya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara baik serta mampu mendorong masyarakat untuk selalu memaksimalkan kreatifitasnya dengan baik dalam menggunakan tehnologi sebagai sarana mendapatkan informasi agar dapat berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Selain diatas, peran Bakohumas yang tidak kalah penting adalah turut mengelola informasi mengenai politik terutama ketika menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. R Hatono selaku menteri penerangan saat itu meminta kepada Bakohumas agar meng *counter*, dan menetralsisir isu-isu negatif saat itu, agar tidak terjadi hal-hal negative dari isu tersebut. Bakohumas diharuskan untuk selalu siaga dari ancaman dan gangguan selama masa sidang umum MPR RI di tahun 1993. Ada 3 tahap yang dapat ditempuh agar menyukkseskan sidang unum tersebut yakni, turut mengkondisikan masyarakat agar tetap kondusif, melakukan program kampanye serentak yang menciptakan suasana damai di tengah masyarakat, dan turut mensosialisasikan GBHN kepada seluruh masyarakat.

Tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid dipilih sebagai presiden ke empat RI, dan Presiden memutuskan untuk membubarkan departemen Penerangan yang menjadi naungan Bakohumas, meski Bakohumas tidak ikut dibubarkan, tetapi eksistensi dan keaktifan organisasi ini sebagai organisasi yang mewadahi para praktisi Humas pemerintah menjadi menurun. Setelah digantikan oleh Megawati sebagai presiden kelima, maka Indonesia memiliki kementerian baru yakni kementerian komunikasi dan informasi untuk menggantikan kementerian penerangan yang menadi tempat Bakohumas bernaung. Tidak lama kabinet Indonesia bersatu I, mengganti kementerian tersebut menjadi Kementerian komunikasi dan informatika. (Hakim Wilda dkk, 2013: 30)

Sepanjang era Reformasi Bakohumas turut memperbaiki diri dan bertransisi mengikuti era yang menjadi serba tehnologi. Menteri Komunikasi dan informatika Syamsul Mua'rif saat itu mengingatkan lagi kepada para praktisi humas pmerintah yang tergabung dalam Bakohumas, untuk memahami lagi apa sebenarnya fungsi mereka, dan mulai untuk mereposisi kembali fungsi-fungsi yang dilakukan, karena kebiasaan masyarakat sudah banyak berubah, dan mewajibkan para praktisi ini untuk lebih peka dan lebih tau tentang isu-isu yang disinyalir akan timbul di masyarakat.

2. PERHUMAS (Perhimpunan Hubungan Masyarakat)

Awal didirikannya PERHUMAS di pelopori oleh Marah Joenoes sesaat setelah beliau menghadiri “World Public Relation Congress” yang ke 6 di Jenewa. Beliau memang bercita-cita untuk mendirikan organisasi kehumasan sehingga beliau bertekad dalam mengikuti berbagai macam konferensi dan diskusi demi lahirnya organisasi humas pertama di Indonesia pada waktu itu. Pertemuan pertama alinya diadakan di gedung Wisma Internasional Pertamina (saat ini Gedung Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI – PEPABRI) di jalan Diponegoro No. 53, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa praktisi Humas seperti dari sektor pemerintahan sipil dan militer, Humas BUMN, serta Humas swasta maupun Konsultan.

Hasil dari pertemuan tersebut ialah munculnya kesepakatan untuk mendirikan organisasi tingkat nasional dan ditunjuknya Marah Joenoes, Tommy Graciano, dan Wisaksono Nuradi untuk membuat nama organisasi serta membuat anggaran dasar. Maka nama PERHUMAS lahir berdasarkan kebutuhan akan adanya forum yang digunakan untuk bertukar

pengalaman dan ilmu dalam ranah Humas serta menjadi wadah untuk para praktisi Humas agar prakteknya Indonesia menjadi semakin berkualitas.

PERHUMAS merupakan organisasi pertama untuk profesi praktisi humas dan komunikasi Indonesia, didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. PERHUMAS telah tercatat secara resmi di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia dan juga telah diakui IPRA (International Public Relation Association) yang berpusat di London. Sebagai Organisasi Profesi Humas pertama di Indonesia Perhumas memiliki beberapa tujuan utama seperti Meningkatkan keterampilan professional untuk para anggotanya, Memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam hal ini pengetahuan dalam segala aspek terutama humas dan komunikasi, Meningkatkan kerjasama dengan organisasi-oraganisasi serupa yang ada di luar negeri sebagai sarana untuk bertukar pengalaman.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan seperti penerbitan news letter, penelitian dalam bentuk jurnal dan buku berdasarkan dari pengalaman yang telah dilalui dari awal Perhumas sampai saat ini. Dalam hal lain Perhumas juga ikut menjadi pelopor lahirnya FAPRO (Federation of Asean Public Relation) di kuala Lumpur tanggal 17 desember 1977. Banyak yang telah dilakukan Perhumas dalam mencapai visi misi, salah satunya, menjadi Penyelenggara ASEAN Public Relations Congress di Jakarta pada Tahun 1981, diterimanya Perhumas dalam Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) pada tahun 2002, di tahun 2004 diselenggarakannya Musyawarah Nasional dan juga Konverensi Nasional Humas Indonesia yang didakan di tahun 2006. Saat ini masih terusberjalan kongres, pelatihan, serta workshop tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga masyarakat umum yang tertarik dengan dunia Humas.

Perhumas juga mendirikan Perhumas Muda yang diperuntukan kepada mahasiswa/i maupun dari masyarakat umum yang ingin mengetahui dan belajar tentang Humas meskipun bukan dari background komunikasi. perhumas muda tersebar di beberapa kota, seperti Perhumas muda Yogya, Solo, Semarang, Malang, Medan, Bogor, dan Riau. Perhumas memiliki visi dan misi sebagai berikut “Mengembangkan kompetensi para professional humas (Public Relations) di Indonesia untuk mendukung pengembangan citra positif dan reputasi Institusi dan bangsa Indonesia.

Perhumas memiliki beberapa aturan mengenai keanggotaan, dimana anggota terdiri dari: **(1.) Anggota Muda**, yakni warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia. Sedang belajar pada salah satu lembaga pendidikan atau mereka sedang mempersiapkan diri dalam karir humas. **(2.) Anggota Biasa**, yakni warga Negara Indonesia mempunyai profesi dibidang humas. **(3.) Anggota Lestari**, yakni anggota PERHUMAS INDONESIA yang sekurang-kurangnya telah menjadi anggota selama 15 tahun **(4.) Anggota Kehormatan**, yakni seseorang yang telah berjasa terhadap perkembangan profesi humas di Indonesia atau kepada PERHUMAS. (<http://www.perhumas.or.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018)

Untuk penerimaan keanggotaan PERHUMAS juga memiliki beberapa kebijakan sebagai berikut: (1.) Penerimaan dan penggolongan keanggotaan dilaksanakan oleh BPC PERHUMAS berhak mengeluarkan kartu anggota. (2.) Nama-nama anggota yang telah disetujui BPC dikirimkan ke BPP untuk dilaporkan. (3.) Anggota kehormatan, anggota lestari diusulkan oleh BPC PERHUMAS INDONESIA dan ditetapkan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA. Sedangkan untuk pengakhiran keanggotaan dalam PERHUMAS dapat dilakukan atas beberapa hal berikut: (1.) Atas permintaan sendiri. (2.) Meninggal dunia. (3.) melanggar kode etik PERHUMAS INDONESIA. (4.) terkena vonis pidana, sama atau lebih dari 5 tahun. (<http://www.perhumas.or.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018)

Dalam dunia Humas diperlukan pula akreditasi untuk para praktisi maupun akademisi yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan yang bersangkutan dalam dunia Humas secara pengetahuan, maupun praktiknya di lapangan dan dianggap layak . Selain itu yang bersangkutan juga memiliki pengakuan dari publik dan ia layak untuk diangkat bekerja sama dengan sebuah perusahaan maupun instansi. Dan juga melatih para Humas untuk dapat memberikan hasil kerja/ output yang terbaik untuk tempat yang bekerja sama dengannya. Ujian akreditasi akan diuji oleh Dewan Panelis yang dipilih langsung oleh PERHUMAS, diantaranya memiliki kredibilitas tinggi, dan juga memiliki pengalaman 15 tahun lebih berkarir di bidang praktisi PR, konsultan/industri, pemerintahan, maupun akademisi.

Seperti yang telah ditulis diatas bahwa Indonesia tidak memiliki kode etik PR resmi nasional karena tidak ada yang mewadahi kerja PR, tetapi setiap organisasi Humas memiliki

kode etik tersendiri, contohnya seperti PERHUMAS yang memiliki kode etik seperti yang telah tertera di lampiran.

3. APPRI (Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia)

Setelah Indonesia merdeka banyak perusahaan asing dan juga para investor yang mulai berdatangan. Perusahaan-Perusahaan PR di Indonesia dirasa belum memiliki asosiasi yang dapat menaungi mereka, maka pada tanggal 10 April 1987 beberapa tokoh PR di Indonesia yang memiliki perusahaan PR diantaranya yaitu Inke Maris, Maria Wongsonagoro, Miranty Abidin, Edowati Sudjono, Srikandi Hakim, Sayono, Ida Sudoyo sepakat untuk mendirikan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI).

APPRI sempat fakum ditahun 90 an salah satu alasannya karena tidak ada lembaga hukum yang menaungi dan juga saling berkompetisi dengan perusahaan PR asing yang dimana mereka telah lebih dulu memiliki cases study dan juga memiliki praktisi-praktisi senior. Kemudian di tahun 2015 APPRI di *refresh* kembali yang hampir bersamaan dengan didirikannya majalah PR Indonesia. di tahun-tahun awal APPRI masih berusaha untuk menarik *awareness* masyarakat sehingga belum terlalu banyak memiliki agenda dan kegiatan yang menguntungkan untuk anggota-anggotanya.

APPRI mulai bergandengan tangan dengan PR Indonesia dalam mengadakan beberapa kegiatan seperti seminar dan workshop untuk para mahasiswa diberbagai kota, kemudian dari sanalah publik mulai *aware* dengan APPRI. Setelah *awareness* diraih, saat ini APPRI sedang berfokus pada bagaimana memberi manfaat untuk industry asosiasi perusahaan PR ini, agar menjadi lebih kuat dan dapat bersaing dengan organisasi perusahaan lain serta memberi dampak baik bagi Negara.

B. Profesionalisme Humas

Sebagian besar profesional PR menggambarkan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang menarik dan selalu berubah-ubah setiap harinya. Satu frasa umum yang paling banyak

diucapkan adalah "tidak ada dua hari yang sama." Bagi orang yang lebih senang untuk bekerja yang berubah-ubah dan terbuka, PR merupakan jawabannya, sedangkan bagi orang yang mengutamakan konsistensi dan stabilitas, PR akan terasa melelahkan. Sebagian besar profesional di bidang PR berasal dari berbagai latar belakang. Banyak perusahaan lebih memilih pekerja dengan pengalaman dan kualifikasi dalam industri klien mereka, daripada hanya PR. Misalnya, Demikian juga, para profesional PR dengan gelar dalam ilmu politik sering bekerja pada tim yang mendukung organisasi milik pemerintah atau tokoh masyarakat.

Arti dari profesi PR yang sebenarnya adalah profesi menantang, perlu adanya kemampuan berkomunikasi yang baik dan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai masalah interl dan eksternal. Hakikatnya para professional memiliki kehidupan dengan menerapkan keterampilan atau keahlian tertentu dalam suatu kegiatan, disesuaikan dengan keahlian mereka. Seorang profesional harus memiliki keahlian melalui proses pendidikan dan beberapa sifat lain seperti memiliki dedikasi, dan semangat yang tinggi. Harus melakukan segala sesuatu secara objektif dan jauh dari sifat-sifat emosi, benci, malu terutama dalam mengambil keputusan.

Profesional juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki 3 unsur utama pada manusia yakni terampil, ilmu pengetahuan, dan sikap yang baik. Seseorang yang profesional juga pasti memiliki integritas tinggi, lebih mengutamakan kepentingan publik dari kepentingan pribadi, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut bidangnya.

Karir untuk humas pemerintah di Indonesia secara resmi mulai diselenggarakan di tahun 1999. Humas pemerintah dibangun oleh jaringan simetris, idealis dan kritis. Mereka juga memiliki peraturan dan kebijakan sebagai asa melakukan pekerjaan. Humas pemerintah tidak hanya bekerja untuk membangun citra positif dan mengelola reputasi lembaga, tetapi juga untuk mengelola kepentingan publik dan pemangku kepentingan. Humas pemerintah juga, harus beraktivitas sosial yang bertujuan untuk membangun dan mengelola kepercayaan, legitimasi, dan pemahaman dari masyarakat luas.

Kerja PR merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persepsi dan nilai sehingga mewajibkan para praktisinya untuk memiliki dasar pekerjaan yang dilakukan secara professional, beretika, berkualitas, transparan, efektif dan obyektif. Karena ketika dasar-dasar

kerja tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempengaruhi seluruh kegiatan yang ada di perusahaan maupun instansi yang ia wakili sebaliknya jika dasar-dasar tersebut telah dilakukan secara optimal dan handal maka dapat membentuk *image* positif serta bagi tempat yang ia wakili. (Ulfa,dkk, 2017: 47)

Profesi PR terkenal dengan orang-orangnya yang memiliki etika baik, bagaimana perilaku, tindakan, dan hubungannya dengan orang lain dapat dikelola dengan baik. Menurut Yunani kuno secara huruf pengertian etika yakni berasal dari kata “ethikos” yang artinya adalah kebiasaan dimana merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai dan kualitas agar dapat menjadi standart dan penilaian moral.

Etika menjadi kunci utama seseorang dalam menjalankan kewajiban dan haknya, tanpa ada etika maka semuanya akan terasa tidak tertata. Di dalam konsep etika terdapat hal-hal seperti baik, buruk, betul dan salah. Sehingga etika merupakan pemahaman moral mengenai suatu norma yang ada di daerah atau lingkup tertentu dimana dapat digunakan seseorang sebagai asas dalam menjalankan sebuah kegiatan. Sedangkan profesionalisme menurut (KBBI, 1994) profesionalisme adalah suatu kemahiran dalam hal ini kata sifat yang dimiliki oleh seorang profesional. Sehingga profesionalisme merupakan hubungan kemahiran seseorang terhadap profesi yang ia miliki.

Profesionalisme juga dapat dikategorikan sebagai seseorang yang ahli dalam suatu bidang tertentu dan kemudian bekerja di dalam bidang yang ia kuasai tersebut. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu asosiasi maupun organisasi yang didirikan secara legal dan diakui pemerintah. Meskipun begitu, seringkali penggunaan kata “professional” digunakan bukan hanya untuk seseorang yang merupakan anggota dari sebuah organisasi resmi contohnya seperti Tantowi Ahmad merupakan atlet bulu tangkis professional, dimana ia adalah atlet yang sering memenangkan turnamen dan mengharumkan nama bangsa. Bukan jasa yang kemudian mendapatkan uang atas profesionalismenya.

Profesionalisme dapat dilihat ketika terdapat kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau birokrasi dengan kebutuhan tugas. Sehingga dapat dikatakan sebuah perusahaan maupun jasa PR memiliki profesionalisme kerja apabila jika selalu menampilkan perilaku yang baik dan dapat menjadi acuan orang lain, selalu meningkatkan dan memelihara

profesionalismenya menjadi semakin baik dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti cara berpenampilan, berbicara, penggunaan bahasa yang tepat dan *body language*. Dan selalu berkeinginan untuk mengejar kesempatan sebagai bahan untuk mengembangkan profesionalisme kerja.

Etika dan sikap professional PR akan menjadi sebuah pembeda dengan praktisi dan tenaga lainnya, dan memiliki *value* tersendiri bagi klien atau perusahaan yang bekerjasama dengannya. Hal tersebut berasaskan pada:

1. Professional ethics

Para pekerja humas harus memiliki etika yang professional karena tugas humas berhubungan langsung dengan khalayak, sehingga apa yang nampak pada seorang humas akan menggambarkan bagaimana perusahaan atau instansi tempatnya bekerja.

2. The imperative of trust

Hubungan suatu perusahaan dengan pekerja PR masuk kedalam hubungan yang cukup erat karena ada banyak hal dari perusahaan yang harus diketahui oleh PR agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Perusahaan tidak hanya meminta bantuan kepada PR tetapi mengerahkan seluruh tanggung jawab dan resiko, sehingga harus saling percaya.

3. Professional Previlage

Professional previlage merupakan hak istimewa yang dimiliki para professional PR dalam semua sektor untuk menjunjung tinggi hak asasinya dalam bekerja maka dibuatlah kode etik dan standarisasi kerja yang terdapat hukum di dalamnya sebagai asas.

4. Social responsibility

Para professional PR memiliki kewajiban lain diluar pekerjaannya di sebuah perusahaan atau instansi yakni kewajiban moral kepada masyarakat. karena kerja PR memiliki dampak besar terhadap masyarakat sehingga sekiranya dapat mengaplikasikannya di lingkup masyarakat dengan tanggung jawab.

Di Indonesia untuk menjadi seorang professional PR diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi, materi yang diujikan berbeda-beda sesuai dengan bidang kerjanya. Seperti yang dijelaskan LSP PRI (Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relation Indonesia) dalam website resminya, bahwa proses kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. LSP PRI telah mempersiapkan uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan para calon praktisi PR yang akan dihadapi kedepannya yang telah disahkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Hutabarat Diani, https://kominfo.go.id/content/detail/7376/sertifikasi-public-relations-agar-siap-berkompetisi/0/berita_satker, diakses pada tanggal 6 Januari 2019).

Terdapat berbagai macam kategori jabatan yang dapat di ikuti dalam uji kompetensi yang dilaksanakan LSP PRI, diantaranya adalah: Executive PR, Managerial PR, Strategic PR, Certified Event Organizer, Certified Event Marketing Communication, Supervisor Associate PR, Public Media Relations Officer, Junior PR Officer, dan Certified PR Practitioner (CPR).

Pada kategori supervisor dan manajer dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, menganalisa, menyusun strategi, mengevaluasi, dan bertanggung jawab atas seluruh hal yang berkaitan dengan bidang kehumasan. Sedangkan untuk kategori PR strategis diharuskan untuk memiliki keterampilan yang berhubungan dalam komunikasi strategis, serta kemampuan dalam bidang teknis, seperti pelaksanaan kegiatan dan menganalisanya. (Muktiyo. Skema Sertifikasi, <https://lsppri.or.id/skema-sertifikasi/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2019).

Untuk bidang event, marketing dan media dituntut untuk memiliki kemampuan dalam branding, negosiasi, dan juga pemikiran kreatif, karena bidang ini berhubungan langsung dengan klien dan yang menentukan jumlah pemasukan perusahaan. Diharapkan para peserta uji kompetensi telah memiliki pengalaman berterjun langsung di dunia PR, karena pada dasarnya materi yang diuji merupakan strategi dalam memecahkan permasalahan.

Uji kompetensi diadakan oleh beberapa Asosiasi dan juga perguruan tinggi PR, sehingga untuk syarat dan ketentuan dokumen tentu saja berbeda, untuk waktu pelaksanaan juga berbeda tetapi rata-rata uji kompetensi dilakukan setiap setahun sekali. Seperti yang

dikatakan Kepala Bidang Evalop Puslitbang Kementerian Komunikasi dan Informatika Haryati bahwasanya untuk dapat memiliki tenaga PR yang baik dan professional maka diperlukannya uji kompetensi agar dapat mengasah kemampuan dan bersaing dengan tenaga humas lainnya. (Hakim Nur Rahmat.2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2019).